

## TOLAK TPA DI CIPAYUNG PINDAH KE LULUT NAMBO Petugas Sampah: Nanti Saya Enggak Bisa Cari Makan

**JAKARTA (IM)** - Sejumlah petugas sampah Cipayung tidak setuju dengan pemindahan sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo.

Pasalnya, TPA itu merupakan satu-satunya tempat mereka mencari nafkah. "Kalo dipindahkan ke Lulut-Nambo, saya dan orang sini tidak bisa cari makan. Apalagi orang sekitar TPA kan pekerjaannya pemulung," kata salah satu petugas sampah RT 04 Blok Sawo, Cipayung, Depok, Nardi, Senin (8/1). Nardi ungkapkan, pemindahan lokasi pembuangan akan menyulitkan para petugas sampah. Jika mereka pindah memulung ke TPPAS Lulut Nambo, mobilitas mereka menjadi lebih sulit dan ada tambahan biaya operasional.

"Kalau nanti dioper ke Nambo, saya bisa aja harus mengantar sampah ke sana. Gerobak kayak gini mana kuat, tapi kalau mau pakai motor atau mobil sampah, ya harus bayar lagi," jelasnya.

Hal tersebut cukup memberatkan Nardi karena upah yang diterimanya hanya mengandalkan warga dari wilayah

tempat bekerjanya, yaitu sekitar Rp 25.000 - Rp 500.000 per bulan. "Paling minimal kan ada biaya uang rokok untuk mereka yang bawa sampah kita sekitar Rp 5.000 - Rp 10.000, ya itu jelas pakai uang pribadi (dari upah bulanan yang saya terima)," tambah Nardi.

Di samping itu, Nardi sebagai petugas sampah bekerja setiap Senin-Sabtu di beberapa RT. Dia harus bolak-balik sekitar 2-3 kali ke TPA Cipayung untuk mengangkut semua sampah dari satu RT. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana perubahan ritme kerjanya jika TPA dipindahkan.

Meski demikian, saat ini TPA Cipayung sudah dalam kondisi lebih aman dan terkendali dibandingkan tahun lalu karena semua alat pengangkat sampah yakni sebanyak 9 unit beroperasi. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TPA Cipayung, Danru. "Kemarini tuh sempat menumpuk karena alat yang beroperasi cuma ada 4 unit, sisanya rusak. Tapi sekarang sudah aman (sebanyak 9 unit), meskipun ya kalau soal overload tentu saja masih ya," tutupnya. ● yan

## KPU Kabupaten Bekasi Temukan Logistik Pemilu dalam Kondisi Rusak

**KABUPATEN BEKASI (IM)** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menemukan sejumlah logistik pemilu berupa kotak dan bilik suara dalam kondisi rusak.

"Dari proses sortir yang dilakukan, ada beberapa yang rusak sehingga perlu kami tukar," kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Rido di Cikarang, Senin (8/1).

Dia mengatakan dari total 42.321 kiriman kotak suara, 16 unit di antaranya mengalami kerusakan, sementara bilik suara yang rusak sebanyak 10 unit dari 33.668 bilik suara. Kerusakan logistik ini telah ditindaklanjuti KPU Kabupaten Bekasi dengan pelaporan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat sekaligus mengusulkan penggantian unit logistik yang rusak tersebut.

"Kita berkiriman surat ke KPU Jawa Barat tentang logistik yang rusak sehingga nanti akan dilakukan pergan-

tian sesuai apa yang kita usulkan pada surat kita," katanya.

Ali memastikan seluruh logistik pemilu yang telah diterima tersimpan dengan baik di gudang logistik KPU Kabupaten Bekasi sebelum nanti didistribusikan ke 8.417 tempat pemungutan suara (TPS) yang telah disiapkan. "Tahapan distribusi logistik sampai hari ini 80 persen sudah terpenuhi tinggal dua jenis surat suara yakni DPD RI dan Presiden serta Wakil Presiden (yang belum diterima). Sampai saat ini keutuhan logistik pemilu tetap kita jaga," katanya.

Pihaknya juga telah mengantisipasi datang musim hujan yang dapat berpotensi mengurangi keamanan dan kualitas logistik di tempat penyimpanan dengan memastikan ketinggian gudang memenuhi persyaratan. PU Kabupaten Bekasi bahkan turut melakukan mitigasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat dengan memetakan wilayah rawan banjir di sekitar area TPS.

Melalui skema titik koordinat, pemetaan diperlukan untuk menggeser lokasi TPS apabila memang masuk wilayah rawan banjir agar tidak sampai membahayakan pemilih maupun menghambat tugas penyelenggara saat pemungutan suara. "Dari laporan sementara, ada beberapa wilayah kecamatan namun baru menyebabkan gangguan saja, tidak sampai banjir," kata dia. ● pra

### PENGUMUMAN

Dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT SAGA SANGIR SELARAS, berkedudukan di Kota Bandung (Perseroan) tertanggal 2 Januari 2024, telah diputuskan untuk menurunkan modal dasar Perseroan dari semula Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan, masing-masing dari sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Kepada para Kreditor yang keberatan atas penurunan modal tersebut, dapat mengajukan keberatan melalui surat tercatat disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini yang ditujukan kepada :

**PT SAGA SANGIR SELARAS**  
Jl. Otto Iskandardinata nomor 18, Bandung  
Up: Direksi Perseroan  
Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Bandung, 9 Januari 2024.-  
Direksi PT SAGA SANGIR SELARAS

### PENGUMUMAN

Dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT NUNUKAN DWIPA ASRI, berkedudukan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur (Perseroan) tertanggal 2 Januari 2024, telah diputuskan untuk menurunkan modal dasar Perseroan dari semula Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan, masing-masing dari sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Kepada para Kreditor yang keberatan atas penurunan modal tersebut, dapat mengajukan keberatan melalui surat tercatat disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini yang ditujukan kepada :

**PT NUNUKAN DWIPA ASRI**  
Jl. Kedondong nomor 68A, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur  
Up: Direksi Perseroan  
Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Bulungan, 9 Januari 2024.-  
Direksi PT NUNUKAN DWIPA ASRI

### PENGUMUMAN

Dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT BATANG BANGKO HIDRO ENERGI, berkedudukan di Kota Bandung (Perseroan) tertanggal 2 Januari 2024, telah diputuskan untuk menurunkan modal dasar Perseroan dari semula Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan, masing-masing dari sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Kepada para Kreditor yang keberatan atas penurunan modal tersebut, dapat mengajukan keberatan melalui surat tercatat disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini yang ditujukan kepada :

**PT BATANG BANGKO HIDRO ENERGI**  
Jl. Otto Iskandardinata nomor 18, Bandung  
Up: Direksi Perseroan  
Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Bandung, 9 Januari 2024.-  
Direksi PT BATANG BANGKO HIDRO ENERGI

### PENGUMUMAN

Dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT SINGKAWIT SAWIT LESTARI, berkedudukan di Kota Bandung (Perseroan) tertanggal 2 Januari 2024, telah diputuskan untuk menurunkan modal dasar Perseroan dari semula Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan, masing-masing dari sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Kepada para Kreditor yang keberatan atas penurunan modal tersebut, dapat mengajukan keberatan melalui surat tercatat disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini yang ditujukan kepada :

**PT SINERGI SAWIT LESTARI**  
Jl. Kedondong nomor 68A, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur  
Up: Direksi Perseroan  
Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Bulungan, 9 Januari 2024.-  
Direksi PT SINERGI SAWIT LESTARI

### PENGUMUMAN

Dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT SUKALAKSANA HIDRO ENERGI, berkedudukan di Kota Bandung (Perseroan) tertanggal 2 Januari 2024, telah diputuskan untuk menurunkan modal dasar Perseroan dari semula Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan, masing-masing dari sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

Kepada para Kreditor yang keberatan atas penurunan modal tersebut, dapat mengajukan keberatan melalui surat tercatat disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini yang ditujukan kepada :

**PT SUKALAKSANA HIDRO ENERGI**  
Jl. Otto Iskandardinata nomor 18, Bandung  
Up: Direksi Perseroan  
Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Bandung, 9 Januari 2024.-  
Direksi PT SUKALAKSANA HIDRO ENERGI

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT



## PERTANIAN DI JAKARTA

Petani menarik tali yang terhubung alat keprak kaleng (kaleng isi batu) untuk mengusir hama burung di area persawahan Rotoran, Jakarta Utara, Senin (8/1). BPS DKI Jakarta menyebutkan hasil Sensus Pertanian 2023 tahap 1 jumlah usaha pertanian ST 2023 berada di angka 13.798 unit, turun 2,92 persen dibandingkan 2013 sebanyak 14.214 unit.

## KASUS KORUPSI DI BEKASI

# Dana Hibah Jakarta untuk Daerah Mitra Diminta Dihentikan Sementara

Diingatkan bahwa dana hibah itu termasuk dana pajak warga Jakarta yang harus dipertanggungjawabkan. "Wajib lakukan moratorium untuk pelaporan anggaran yang telah dikeluarkan," kata anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari.

**JAKARTA (IM)** - Anggota DPRD DKI Jakarta

memunculkan wacana penghentian sementara pemberian

dana hibah kepada daerah mitra. Alasannya, penetapan tersangka korupsi atas dana hibah sebesar Rp 22,9 miliar pada 2021 oleh Kejaksaan Negeri Bekasi kepada mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup di kota itu.

Diingatkan bahwa dana hibah itu termasuk dana pajak warga Jakarta yang harus dipertanggungjawabkan. "Wajib lakukan moratorium untuk pelaporan anggaran

yang telah dikeluarkan," kata anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Senin (8/1).

Terutama perihal ada atau tidak kewajiban pelaporan keuangan secara rinci. Harapannya, setiap penyaluran dana hibah tidak merugikan masyarakat Jakarta. "Ini harus jadi perhatian bersama," ujarnya.

Menurutnya, hibah bisa menjadi alat atau jalan penyelewengan APBD. Di sisi lain, hubungan kerja sama harus dijaga bermanfaat bagi kelangsungan hidup warga penerima hibah. Apalagi Bekasi disebutnya lokasi yang sangat dekat dengan Jakarta.

Eneng menjelaskan, DKI Jakarta selama ini membutuhkan daerah Kota Bekasi sebagai penyanggah pembangunan apalagi untuk isu sampah. Tanpa Bekasi, Jakarta disebutnya akan sangat

kelimpungan menyelesaikan persoalan sampah.

Kejaksanaan Negeri Kota Bekasi menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi pengadaan ekskavator dan bulldozer pada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi 2021. Anggaran pengadaan ekskavator dan bulldozer itu bersumber dari dana bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai pagu sekitar Rp 22,9 miliar.

Di antara keempatnya adalah T yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas LH Kota Bekasi 2021 dan DA yang sampai kini masih PNS Dinas LH Kota Bekasi.

Dua lainnya adalah IP selaku kontraktor dan Yayan Yuliana yang menjadi Kepala Dinas LH Kota Bekasi saat itu--kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi. Keempatnya disangka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 5,1 miliar. ● yan

## DIRESMIKAN PRESIDEN JOKOWI

# BPN Kota Depok Jelaskan Progres Pembebasan Lahan Tol Cijago

FOTO : BPN KOTA DEPOK



Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan saat menghadiri peresmian jalan tol Pamulang, Cinere, Raya Bogor (Cijago) oleh Presiden RI Joko Widodo di Kecamatan Limo, pada Senin, (8/1).

**DEPOK (IM)** - Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto dan Kepala Kantor ATR BPN Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya dalam peresmian jalan tol Pamulang, Cinere, Raya Bogor (Cijago) oleh Presiden RI Joko Widodo di Kecamatan Limo, pada Senin (8/1).

Terkait progres pembebasan lahan untuk tol Cijago, Indra Gunawan menjelaskan, target pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut menembus 4.338 bidang, dengan luas 144,3100 hektare. Sementara, hingga akhir Desember 2023 yang telah terealisasi sebanyak 4.279 bidang dengan luas 138,8767 hal (98,63%). Dari luasan lahan yang dibebaskan tersebut, terdapat 59 bidang loop (jalur lingkaran tambahan) dan 3 bidang dalam ROW.

"Alhamdulillah, progresnya cukup menggembirakan. Dari sisa bidang tanah yang belum dibebaskan di Kecamatan Limo terdapat 59 bidang loop dan 3 bidang dalam ROW," ujar Indra Gunawan kepada wartawan di

sela-sela peresmian tol Cijago. Saat ini, sambung Indra, sisa tanah tersebut sudah masuk dalam beberapa sesi penyelesaian baik validasi hingga konsinyasi.

"Untuk validasi ada 33 bidang, pada tahap musyawarah 25 bidang sementara tahap penilaian 3 bidang Nah, untuk tahap konsinyasi ada satu bidang," jelas mantan Kepala Bagian Humas dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) Kementerian ATR/BPN.

Dijelaskan Indra, jalan tol tersebut memiliki total panjang 14,8 km dengan total investasi sebesar Rp 4 triliun berdasarkan data dari Kementerian PUPR.

Tol yang barusan diresmikan Presiden Jokowi hari ini melengkapi struktur jaringan jalan tol yang ada di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Di antaranya adalah lingkaran dalam, Jakarta Outer Ring Road 1, dan Jakarta Outer Ring Road 2.

"Jalan tol yang diresmikan hari ini merupakan bagian dari JORR 2 yang diharapkan diselesaikan pada kuartal kedua tahun ini. Ini menjadi target pemerintah pada tahun 2024," jelas Indra Gunawan. Sementara itu Presiden

Jokowi dalam sambutannya berharap kehadiran jalan tol Cijago dapat memberikan lebih banyak alternatif jalan kepada masyarakat untuk menjangkau tempat-tempat di Jabodetabek.

Selain itu, jalan tol tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan mengurangi kemacetan. Di sisi lain mampu memperlancar mobilitas orang, mobilitas barang.

"Termasuk mobilitas logistik yang kita harapkan ini akan mengurangi kemacetan dan masyarakat memiliki pilihan, memiliki alternatif dengan menggunakan ruas jalan yang lebih lancar," tutup Presiden Jokowi.

Sekadar diketahui, turut mendampingi presiden dalam peresmian Tol Cijago di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Hadir pula Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Forkopimda Kota Depok. ● ber

## Pemprov DKI Tambah Pos Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi 35 unit. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembertan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Tahun 2024 telah dilakukan penguatan terhadap akses penerimaan pengaduan di Pusat PPA Provinsi DKI Jakarta melalui penambahan pos pengaduan menjadi 35 pos pengaduan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary di Jakarta, Senin (8/1).

Selain itu, Dinas PPAPP DKI dalam upaya memenuhi hak korban juga menambah sumber daya manusia (SDM) untuk memberikan pelayanan profesional dan penguatan jaringan berkolaborasi dengan mitra.

"Jadi memang upaya Dinas PPAPP dalam memberikan pelayanan penanganan pada perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan melalui Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DKI Jakarta," ujar Miftah.

Layanan yang diberikan Pusat PPA DKI Jakarta terdiri dari layanan penerimaan pengaduan, layanan hukum, layanan psikologi,

layanan pendampingan korban dan layanan rujukan medis, rumah perlindungan sementara, dan rujukan rumah aman korban kekerasan. Semua itu diberikan secara gratis.

Selain itu, Miftah menyebut bahwa pengelolaan layanan pusat PPA tidak hanya dilakukan oleh PNS saja, tetapi layanan juga dilakukan oleh tenaga-tenaga kompeten sesuai bidang layanannya seperti tenaga ahli pemenuhan hak korban perempuan dan anak dan tenaga ahli bidang teknologi informasi.

Kemudian juga dari advokat, psikolog klinis, manajer kasus, pendamping korban, pendamping perempuan dan anak (RPS), konselor, tim legal, tim unit reaksi cepat (URC), dan pusat layanan (*call center*).

Berdasarkan data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 terdapat sebanyak 1.682 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan rincian anak perempuan sebanyak 665 kasus, anak laki-laki 286 kasus, dan perempuan dewasa 731 kasus.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan terus menerus melakukan upaya mulai dari hulu untuk pencegahan sampai ke hilir untuk penanganan. ● yan